

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dinamika keamanan internasional pada era globalisasi tidak hanya di dominasi oleh berbagai persoalan konvensional, diantaranya perang antar negara ataupun konflik perbatasan, namun juga masalah-masalah keamanan yang berkaitan dengan *extra ordinary crime/EOC* (kejahatan luar biasa). Salah satunya adalah peredaran narkoba dan obat bius, dimana persoalan ini bukan hanya merusak mental dan produktifitas para pecandu, namun juga akan merusak masa depan suatu negara.

Filipina merupakan salah satu negara dunia yang mengalami masalah perdagangan narkoba yang serius. Jenis obat-obatan yang paling populer di gunakan oleh kalangan pemakai narkoba di Filipina adalah shabu dan ganja, serta beberapa jenis lain dalam skala penggunaan yang lebih kecil. Shabu dan ganja di Filipina masuk dalam daftar obat-obatan terlarang yang menjadi ancaman besar pihak berwenang pemerintah Filipina.<sup>1</sup>

Menurut *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) perdagangan narkoba ilegal terus menimbulkan ancaman nasional yang serius, terutama dalam pemilihan umum nasional di Filipina, karena narko-politik telah menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan, seperti halnya menurut laporan departemen luar negeri Amerika Serikat dimana dinyatakan bahwa perdagangan narkoba dapat mempengaruhi hasil pemilu di Filipina. Ini disebabkan karena banyaknya politisi Filipina masuk dalam dunia narkoba bisa dilihat dari pernyataan Drug Enforcement Agency Filipina

---

<sup>1</sup> “2013 Philippines Drugs Situations”, dalam

<http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/2013thephilippinedrugsituation.pdf>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

yang menyatakan bahwa perdagangan narkoba dapat menghasilkan US \$ 6 miliar menjadi \$ 8,4 miliar pertahunnya.<sup>2</sup>

*Drug Enforcement Agency* (DEA) Filipina menyelidiki sejumlah kasus narkoba yang melibatkan politisi lokal dan adapun daftar anggota politisi yang terkait narkoba dari anggota kongres, anggota dewan dan pejabat pemerintah lokal. Tuduhan tersebut di benarkan oleh Menteri Pertahanan dan Penasihat Keamanan negara Noberto Gonzales pada 1 Maret 2010. Hal ini membuktikan bahwa Filipina mengalami masalah serius terhadap narco-politik dalam pemerintahan.<sup>3</sup>

*United Nations World Report of Drug* tahun 2009 menempatkan Filipina pada urutan kelima sebagai negara produsen shabu/mariyuana untuk kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oceania. Alasan mengapa Filipina mampu dengan mudah mengeskpor shabu di negara-negara lain dipengaruhi oleh faktor geografis. Faktor geografis tersebut menunjukkan bahwa Filipina memiliki 7.641 pulau dan garis pantai sepanjang 36.289 km. Hal tersebut jelas membuat kepolisian, angkatan laut, dan militer kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba.

Sebuah perusahaan konsultan ekonomi dan politik Risk di Manila, mengatakan bahwa Filipina “*tidak hanya titik transshipment, tetapi juga produsen utama obat sintetis untuk seluruh Asia*”. *Drug Enforcement Agency* Filipina menuduh politisi di seluruh negri ikut serta dalam perdagangan obat-obatan terlarang yang memiliki nilai miliaran dolar untuk di kumpulkan agar dapat memberi dukungan terhadap partai.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*,

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> “World Drugs Report : United Nations Office on Drugs and Crime : Philippines Country Report”, dalam [https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World Drug Report 2015.pdf](https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf), diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

Walikota Quezon, Ronnie Mitra, di tangkap karna kasus narkoba yang terbukti menggunakan ambulans kota untuk mengangkut narkoba berupa shabu yang di kirim ke Visayas Filipina Tengah, senilai lebih dari \$ 21 juta dikenakan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2007, sampai detik ini ia tetap tutup mulut tentang siapa mitra kerjanya, ini adalah salah satu contoh penyalahgunaan fasilitas Negara di gunakan sebagai transaksi kejahatan di Filipina demikian hal ini salah satu penyebab munculnya kebijakan presiden Rodrigo Duterte terhadap war on drugs di Filipina.<sup>5</sup>

Narkoba menjadi penggalangan dana untuk pemilu di Filipina, bahwa banyak bukti yang menjelaskan keterlibatan antara para pejabat yang memiliki hubungan baik dengan kelompok bandar narkoba, agar bisa di gunakan sebagai perlindungan ketika beroperasi dan sebaliknya para pejabat diuntungkan dengan hasil melindungi menurut senator Richard Gordon Seperti halnya Rolando Espinosa, walikota Albuera di pulau Leyta dan putranya terlibat dengan kerjasama pengedar narkoba yang saat ini berstatus tewas di sel penjara dikarenakan adanya perlawanan terhadap petugas saat pengeledahan senjata ilegal pada 5 November 2016.<sup>6</sup>

Kebijakan koersif “war on drugs” dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte dapat dilihat dari bagaimana otoritas penegak hukum Filipina memilih menembak para penjahat narkoba tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini banyak memicu kontroversi negara lain atas nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), namun kebijakan presiden Filipina Rodrigo Duterte tetap berjalan dan mendapatkan dukungan 80% dari

---

<sup>5</sup> “Mayor Arrested in Big Drugs Bust”, dalam <http://gulfnnews.com/news/uae/general/mayor-arrested-in-big-drug-bust-1.427271>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

<sup>6</sup> “EX PDEA Exec. Chinese National Placed Under Inquest Proceedings”, dalam <http://www.philstar.com/headlines/2016/01/22/1545222/ex-pdea-exec-chinese-national-placed-under-inquest-proceedings>, diakses pada tanggal 6 November 2017.

masyarakat Filipina, karna menurut masyarakat, narkoba merugikan bagi Filipina, yang memberikan dampak negatif yaitu jumlah kematian yang di sebabkan over dosis narkoba, yang kedua merosotnya ekonomi dan menambah angka pengangguran, yang ketiga yaitu menambah jumlah kriminalitas yang merugikan bagi keamanan negara.<sup>7</sup>

Kebijakan presiden Rodrigo Duterte terhadap war on drugs belaku terhadap semua warga negara Filipina seperti halnya mantan agen penegak hukum *Drug Enforcement Agency Filipina* (PDEA) Letkol Ferdinand Marcelion, beberapa mantan walikota Camarines Sur Andr hidalgo salah satu diantara 186 pejabat yang terdaftar atas tuduhan narkoba 2011-2016 dan aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Daftar operasi narkoba sebelum kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap War on drugs, berdasarkan data dari Drug Enforcement Agency Filipina pada tahun 2011-2015 total 623 termasuk pejabat pemerintah dan karyawan, hal tersebut menunjukkan kenaikan angka dari 201 di tahun 2011 dan 623 di tahun 2015, aparat pemerintah yang bersindiket narkoba merusak kepercayaan dan keyakinan masyarakat, mereka juga membahayakan kampanye anti narkoba di Filipina.<sup>9</sup>

Kartel Sinaloa beroperasi perdagangan narkoba di Filipina, kartel sinaloa adalah organisasi perdagangan narkoba terbesar di belahan bumi barat. Sebuah artikel mengatakan pemimpin utama Kartel, Joaquin El Chapo Guzman menjadi buronan Amerika Serikat setelah melarikan diri dari penjara Meksiko pada tahun 2001 kartel sekarang menjadi kriminal

---

<sup>7</sup> “Gordon Wants New Senate Probe on Espinosa Killing”, dalam <http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/587720/gordon-wants-new-senate-probe-on-espinosa-killing/story/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> “Duterte Sign EO on Anti Drugs Task Force”, dalam <http://www.philstar.com/headlines/2017/03/11/1679974/duterte-signs-anti-drug-task-force>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

paling kuat di bumi ini. Beberapa geng Cina pun di duga ikut andil dalam membantu kartel dari perdagangan obat bius untuk membangun operasi di Filipina, hal tersebut telah di sebutkan oleh presiden Duterte sebagai daftar bahwa kartel membuat forays di wilayah Filipina, di temukan beberapa fasilitas penyimpanan shabu di kota Lipa dan tertangkapnya anggota kartel yang di indetifikasi sebagai Gay tan, Argay Argenos, dan Rocchelle Argenos. Sesuai dengan pernyataan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada 30 mei 2016 bahwa para narkoba adalah perusak bagi anak bangsa dan 100.000 akan meninggal dalam memerangi narkoba, sesuai data dari kepala kepolisian narkoba Ronald Dela Rosa 10.153 di tangkap, lebih dari 600.000 pengedar narkoba dan pemakainya menyerahkan diri, lebih dari 1.900 orang yang berkaitan dengan narkoba di bunuh dan akan masih bertambah jumlahnya.<sup>10</sup>

Presiden Filipia Rodrigo Dutere menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan “war on drugs” adalah untuk menghilangkan narco-politik dan memberantas kejahatan narkoba di Filipina. Tetapi dalam implementasi kebijakan “war on drugs” ditemukan beberapa fenomena yang mengancam asas kemanusiaan di Filipina. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana aparat pemerintah Filipina melakukan penembakan di tempat terhadap pelaku-pelaku yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan jaringan narkoba. Menurut definisi hak asasi manusia dari International Human Right Organization, bahwa setiap manusia memiliki asas praduga tak bersalah. Artinya keputusan otoritas penegak hukum di Filipina untuk melakukan penembakan di tempat harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasukan Death Squad dan pembunuh bayaran salah satu bentuk kebijakan presiden Filipina Rodrigo Duterte, merekalah yang mengeksekusi mati bandar narkoba di Filipina, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra terhadap

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

masyarakat Filipina dan negara internasional, hal ini menjadi pertanyaan masyarakat dunia mengapa kebijakan Presiden Rodrigo Duterte menembak mati di tempat, setelah di rasakan masyarakat Filipina ternyata jumlah kejahatan di Filipina yang bersangkutan dengan narkoba berkurang dan banyak dari mereka yang menyerahkan diri untuk di rehabilitasi.

Filipina juga mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan dan tingkat kelahiran yang tinggi dampak buruknya banyak pengangguran dan merujuk ke aktifitas yang negatif seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan yang kebanyakan dilakukan oleh pemakai narkoba yang di dukung oleh aktor-aktor penting negara.

Pada 30 juni 2016 setelah pengangkatan presiden Rodrigo Duterte menyatakan akan menembak mati bagi pengedar narkoba tanpa di adili hal ini yang membuat saya untuk membahas kasus ini dengan memandang dari nilai-nilai *human right's* yang faktanya perang narkoba di Filipina berstatus 10.153 di tangkap, lebih dari 600.000 pengedar narkoba dan pemakainya menyerahkan diri, sekitar 1.800 orang yang berkaitan dengan narkoba di bunuh, dan jendral kepolisian nasional Filipina, Ronald Dela Rosa mengklaim tingkat kejahatan turun menjadi 49% dan Menurut laporan badan otoritas statistik pusat Filipina, *Philippine Statistics Authority* (PSA), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut naik 7,1% pada kuartal ketiga dibandingkan setahun sebelumnya sejak presiden Rodrigo Duterte menjabat.

Kebijakan Duterte dalam perang terhadap narkoba ternyata mendapat berbagai respon dari berbagai elemen dalam dan luar negri. Aksi kontroversial Duterte tersebut yang sering kali dikritik situasi tersebut mirip dengan masa kediktatoran Ferdinand Marcos, sampai pernyataan dari PBB bahwa Duterte melanggar hukum internasional berupa hak-hak dasar dan kebebasan manusia kritik ini muncul setelah hampir 1000 orang tewas dan Duterte membalas pernyataan

“Organisasi Dunia PBB bodoh” hal ini sesuai dengan pernyataan Duterte bahwa :

*“...karena menkritik metode penerapan pemberantasan narkoba di negaranya dan Duterte juga memperingatkan kepada PBB agar tidak ikut campur dalam politik yang sedang berlangsung di Filipina. Hingga Obama juga di sebut Duterte anak pelacur karna mengkritik tentang HAM "Saya tidak peduli dengan dia. Siapa dia? Bahkan, pada faktanya saat peralihan abad, jauh sebelum Amerika meninggalkan tanah Filipina saat kampanye perdamaian Moro di pulau ini, ada sekitar 6 juta populasi Moro. Berapa banyak dari mereka semua yang mati? 600 orang. Jawab pertanyaan itu dan meminta maaf lah, maka saya akan menjawab pertanyaan (mengenai HAM)," <sup>11</sup>*

War on drugs yang dijalankan Duterte merupakan bagian dari kapasitas kolektif dan personal sebagai presiden Filipina, dimana ini telah menjadi prioritas kebijakan ketika masa kampanye pemilu dengan tiga pilar pencapaian dasar, yaitu politik, sosial-ekonomi dan keamanan. Sedangkan war on drugs dijalankan Duterte sebagai pencapaian primer dari pencapaian pilar keamanan untuk mendukung pemantaban (unwavering) bidang politik dan sosial-ekonomi.

Dari berbagai uraian di atas maka dapat difahami bahwa kebijakan Duterte dalam *war on drugs*, bukan semata-mata Euforia politik pasca terpilihnya Duterte sebagai presiden Filipina menggantikan Benigno Aquino. Kebijakan war on drugs memiliki berbagai arti penting untuk mendukung pencapaian agenda jangka pendek dan panjang.

---

<sup>11</sup> “ASEAN, Duterte dan Perang Terhadap Narkoba”, *Kompas*, 2 Mei 2017.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

“Apa faktor-faktor yang melatar belakangi implementasi kebijakan *war on drugs* oleh pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte di tahun 2016 ?

## **C. Kerangka Dasar Teori**

Untuk menjelaskan latar belakang masalah yang dibahas penulis menggunakan kerangka teori, yaitu Teori Peran dan Kebijakan dan Teori Kepentingan Nasional. Kedua teori ini dipandang relevan dengan kasus yang sedang dibahas karena mampu menjabarkan secara terperinci tentang faktor-faktor yang melatar belakangi implementasi kebijakan *war on drugs* oleh pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte di tahun 2016

### **1. Teori Peran dan Proses Pembuatan Kebijakan**

Teori peran merupakan teori yang menitik beratkan pada peran organisasi atau negara dalam menangani suatu peristiwa yang memerlukan kajian dan tindakan yang sistemis. Teori peran (*role theory*) adalah sebuah teori yang menitik beratkan pada sebuah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh orang atau organisasi yang menduduki posisi penting.

Seseorang atau lembaga yang memiliki jabatan atau posisi tersebut diharapkan mampu memainkan atau menjalankan peranannya di dalam posisi atau jabatan yang dipegangnya. Setiap organisasi yang menduduki suatu posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu. Purwo Santoso dan Joash Tapiheru mengutarakan secara rinci

mengenai pemikiran kritis mengenai kebijakan publik dari komprehensivitas dan kecanggihan analisis hingga evaluasi kebijakan. Purwo Santoso lebih jauh menganggap bahwa implementasi kebijakan publik akan dapat lebih mudah dimaknai sebagai proses administratif untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis, dengan mendayagunakan serangkaian instrumen untuk menghasilkan perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Penulis sendiri menganggap bahwa implementasi kebijakan publik bukan hanya sekedar proses untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis, namun lebih dari itu, perlu sebuah pendekatan secara non-tekstual dari pembuat kebijakan untuk merumuskan hingga mengimplementasikan kebijakan publik dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.<sup>12</sup>

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Definisi lainnya menyebutkan bahwa kebijakan adalah *“sebuah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat kebijakan itu sendiri dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”*.<sup>13</sup>

Dengan ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah, menunjukkan adanya suatu kepentingan negara yang ingin dicapai. Pada dasarnya kebijakan suatu negara adalah untuk mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu

---

<sup>12</sup> Santoso, Purwo dan Joash Tapiheru, *Analisis Kebijakan Publik : Modul Pembelajaran*, Research Center for Politics and Government, Yogyakarta, 2010, hal.126.

<sup>13</sup> Marbun, BN. *Kamus Politik Edisi Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal.265.

kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut diambil suatu tindakan yang disebut kebijakan atau *policy*. Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan pemerintah dengan rakyatnya.

*Decision Making* yang dikemukakan oleh Snyder yaitu: merupakan salah satu pilihan dari metodologis pokok kita untuk menerapkan batasan negara pada pembuat keputusannya, yaitu mereka yang tindakan otoritatifnya baik maksud maupun tujuannya adalah tindakan negara. Dimana tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara. Menurut Snyder seorang aktor pembuat keputusan dituntut memiliki pengetahuan biografis yang meliputi: pendidikan, agama, pengalaman kehidupan kritis, latihan profesional, perjalanan ke luar negeri, kesehatan fisik dan mental, pengalaman organisasi, dimana seorang aktor berada serta kegiatan politik sebelumnya merupakan faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dalam melakukan tugasnya.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan kebijakan luar negeri suatu negara, menurut Richard C. Snyder, hal utama dalam menelaah fenomena dan tindakan dalam sistem internasional adalah mengamati proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung. Keputusan yang diambil pada akhirnya merupakan suatu titik tolak dari suatu negara untuk memulai kebijakannya baik didalam negeri sendiri maupun terhadap negara lain. Selanjutnya, Snyder juga mengemukakan dua aspek penting dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: *internal setting* dan *external setting*.

*Setting* sendiri didefinisikan sebagai seperangkat kategori yang relevan dengan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang potensial yang mempunyai pengaruh pada

---

<sup>14</sup> Richard H. Snyder and Burton Sapin, *Foreign Policy Decion Making : Revised*, Palgraff Mc Millan Publishing, London and New York, 2003, hal.39.

tindakan suatu negara. Oleh karena itu, di dalam menentukan arah kebijakan luar negrinya para perumus kebijakan seringkali dihadapkan kepada situasi-situasi tertentu, yang bertanggungjawab kepada orang lain, yang ditekan oleh beragam kondisi, dan yang dipaksa untuk mengambil keputusan. Internal dan eksternal seting ini adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. *Internal setting* meliputi seluruh struktur sistem politik, ideologi yang dianut dan juga mengenai tuntutan dari sebagian besar masyarakat dalam suatu negara. Jika jumlah masyarakat di dalam suatu negara berada dalam jumlah yang banyak maka tentunya akan berpengaruh terhadap masalah-masalah yang sedang menjadi perhatian publik ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara tersebut.
- b. *Eksternal setting* pada umumnya mencakupi faktor-faktor dan kondisi-kondisi atas wilayah territorial suatu negara baik aksi dan reaksi dari negara lain dan masyarakat dengan mana mereka bertindak dalam lingkungan internasional. Dari sudut ini yang patut dipertimbangkan adalah posisi geopolitik negara dalam sistem global serta hubungannya dengan negara lain yang memiliki relevansi.

Konsep pengaruh psikologis terhadap kepribadian, juga diperkuat dengan konsep yang diungkapkan oleh Richard Snyder, yang menyatakan bahwa psikologi pembuat keputusan sebagai bagian dari karakter kepribadian pemimpin aktor rasional terdapat 3 faktor penting yang mempengaruhi “*output*” dari tokoh atau rezim pembuat keputusan, faktor tersebut yaitu :

1. *Made in very general term is that these perefrences do not appear to be entirely individuals or the rules of*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

*organizations system within which the decisions maker operate.*

(secara psikologis pembuatan keputusan umum dilandasi atas sikap yang hati-hati, yang muncul dari pihak individu atau rezim-rezim organisasi kenegaraan yang menjadi faktor penting bagi operasional sistem pembuatan keputusan).

2. *Organizational experience over a periode of a time.*

(pengalaman pembuatan keputusan berdasarkan pada pengalaman yang berjalan dalam kurun waktu yang panjang)

3. *The general heading of biography decisions maker past experience.*

(mekanisme pembuatan keputusan didasari atas pengalaman biografi/sejarah hidup dari tokoh pembuat keputusan sendiri atas pengalaman-pengalaman sebelumnya)

Dalam teori peran dijelaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan dari atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor (bisa bersifat individu maupun kelompok/organisasi).

Kemudian peran institusi formal tersebut di dukung dengan konsep *management resource* institusi formal. Menurut Purwo Santoso pada kondisi berkembang negara kebijakan bukan semata-mata ditujukan sebagai regulasi (payung hukum) bagi kinerja aparatur, namun juga media bagi pendekatan antara elit, pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada masyarakat merupakan bagian dari tanggung-jawab pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sekaligus tanggung-jawab politik.

Kebijakan institusi formal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada era globalisasi tidak semata-mata hanya berkaitan dengan aspek domestik/dalam negeri saja, namun juga berkaitan dengan manajemen atau tata kelola kerjasama luar negeri. Ini disebabkan pada beberapa persoalan yang terjadi melibatkan berbagai isu dan entitas-entitas internasional. Sehingga apa yang ditempuh institusi formal tentunya tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa adanya kerjasama dan hubungan luar negeri yang efektif.

Dari teori kebijakan di atas maka dapat difahami bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi kebijakan *war on drugs* oleh pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte di tahun 2016 adalah berkaitan dengan inisiatif persoalan dan kelompok pendukung (elit politik) untuk dapat menyelesaikan persoalan efektif. Jika dilihat dari kebijakan Richard Snyder maka kebijakan Duterte merupakan kebijakan yang dijalankan secara hati-hati dan sebelumnya dijalankan kebijakan *war on terror*.

Sejak masa kampanye pemilihan presiden, Duterte merupakan figur personal yang memprioritaskan penanganan gangguan pertahaann dan keamanan. Inilah yang kemudian menjadikannya terpilih. Pasca terpilihnya Duterte penanganan narkoba menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah Filipina pada tahun-tahun pertama, bahkan Duterte juga berupaya memberlakukan hukum secara tegas yang ditandai dengan ditangkapnya berbagai aparat yang terlibat narkoba di negara ini.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional ini sering disebut sebagai konsepsi umum yang merupakan unsur vital bagi negara karena tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan bagi para pembuat keputusan dalam merumuskan dalam politik luar negeri adalah inti dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat juga diartikan sebagai

kepentingan negara untuk melindungi teritorial dan kedaulatan Negaranya. Jika menggunakan pendekatan realisme akan kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan negara sebagai unitary aktor yang penekanannya pada peningkatan *national power* (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari negara tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional, adalah sebagai berikut :

*“Kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman para pengambil keputusan (decision maker) suatu negara dalam menentukan politik luar negerinya, berupa konsepsi yang diformulasikan secara khas dari berbagai elemen yang merupakan kebutuhan yang paling vital dari suatu negara berdaulat, yaitu kemerdekaan, integritas wilayah, ekonomi, militer dan keamanan.”*<sup>17</sup>

Konsep kepentingan nasional disini diartikan dalam istilah kekuasaan. Konsep ini merupakan penghubung antara pemikiran yang berusaha memahami politik internasional dan realita yang harus dipahami. Konsep ini menentukan politik sebagai lingkungan tindakan dan pengertian yang berdiri sendiri (otonom) terpisah dari lingkungan lainnya, seperti ilmu ekonomi, etika, estetika atau agama. Konsep kepentingan yang didefenisikan sebagai kekuasaan, memaksakan disiplin intelektual kepada pengamat, memasukkan keteraturan rasional kedalam pokok masalah politik, sehingga memungkinkan pemahaman politik secara teoritis.

---

<sup>16</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Dictionary*, Third Edition, ABC Clio Publisher, Western Michigan University-California, 1982, hal.117.

<sup>17</sup> *Ibid*,

Kepentingan sendiri merupakan politik luar negeri suatu negara yang didasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif permanen yang meliputi tiga faktor yaitu sifat dasar dari kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kepentingan tersebut, dan kepentingan yang rasional. Kepentingan nasional adalah merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realistis karena kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu negara.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional yang dimaksud diartikan sebagai tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman para pengambil keputusan (*decision maker*) suatu negara dalam menentukan politik luar negerinya, berupa konsepsi yang diformulasikan secara khas dari berbagai elemen yang merupakan kebutuhan yang paling vital dari suatu negara berdaulat, yaitu kemerdekaan, integritas wilayah, ekonomi, militer dan keamanan.”

Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut diambil suatu tindakan yang disebut kebijakan atau *policy*. Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan kebijakan luar negeri menekankan hubungan dan kepentingan antara pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain atau organisasi internasional.

Berdasar pada konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton di atas maka dapat diketahui bahwa esensi dari kepentingan nasional suatu negara adalah menyangkut lima hal, yaitu :

- a. Kemerdekaan. Hal ini merupakan sebuah wujud masa depan dari suatu negara yang bebas dari dominasi atau intervensi asing sehingga dapat

menentukan masa depannya serta menyelenggarakan pemerintahan secara efektif.

- b. Integritas wilayah. Hal ini merupakan kepentingan yang sangat penting karena integritas dapat menjamin sebuah kesinambungan bernegara dengan sebuah wujud kesatuan yang saling mendukung antara wilayah satu dengan yang lainnya.
- c. Ekonomi. Hal ini merupakan faktor penting karena ekonomi merupakan variabel penting yang turut menentukan kemajuan suatu negara. Selain itu, ekonomi juga menjadi faktor dominan dalam menentukan citra suatu negara di mata internasional.
- d. Militer. Hal ini merupakan faktor penting sebagai alat utama pertahanan suatu negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam dan luar negeri. Keberadaan fungsi militer juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga dan mewujudkan stabilitas dalam negeri.
- e. Keamanan. Hal ini merupakan faktor penting untuk mewujudkan sebuah eksistensi negara dalam mensejahterakan masyarakat, serta mengimplementasi pembangunan dan berkelanjutan. Selain itu, keamanan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya yang melibatkan aktor-aktor luar negeri.

Kelima konsep di atas memiliki keterkaitan antara variabel satu dengan yang lainnya, misalnya keamanan tidak akan terwujud apabila tidak didukung dengan bidang militer yang memadai. Demikian juga halnya dengan keberadaan militer yang memadai tentunya tidak akan tercapai apabila tidak didukung dengan perekonomian yang maju, demikian pula dengan variabel-variabel lainnya.

Melalui pendekatan teori kepentingan nasional di atas maka difahami bawa implementasi kebijakan *war on drugs*

oleh pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte merupakan upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional. Nantinya stabilitas keamanan yang tercapai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik Filipina. Jika dikaitkan dengan maka keberadaan Duterte sebagai *top person* di Filipina memiliki kewenangan yang begitu besar dan dilihat dari figur personalitas Duterte maka seperti yang diteriakan ketika kampanye atau saat menjadi kandidat presiden yaitu *security before other*, yaitu prioritas bidang keamanan sebelum yang lain karena ini akan menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan lain-lainnya.

#### **D. Hipotesa**

Melalui uraian kerangka dasar teori maka dapat ditarik hipotesa bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi implementasi kebijakan *war on drugs* oleh pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte di tahun 2016 yaitu :

- a. Faktor personalitas Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina yang memprioritaskan pencapaian stabilitas keamanan akibat dipengaruhi kehidupan dan pengalaman pribadi, serta dari masyarakat pendukung dan partai politik Filipina.
- b. Faktor personalitas Rodrigo Duterte sebagai pembuat kebijakan (*decision making actors*) yang berupaya mendukung pencapaian kepentingan nasional Filipina untuk dapat mencapai kepentingan nasional pada bidang politik, sosial-ekonomi dan dinamika internasional.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Sedangkan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.<sup>18</sup>

Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan dan kemudian disusun dan dipaparkan sehingga ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan penelitian.<sup>19</sup>

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet.

## **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah dan membuktikan hipotesa tentang faktor-faktor yang melatar belakangi implementasi kebijakan *war on drugs* oleh pemerintah

---

<sup>18</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1989, hal.140-141.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte di tahun 2016.

2. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis serta pihak-pihak yang membutuhkan tentang berbagai dinamika keamanan Filipina dan *war on drugs*.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian pada tahun 2009-2016. Dipilih tahun 2009 karena menunjukkan periode berkembangnya masalah drugs di Filipina, sedangkan tahun 2016 merupakan awal dari kepemimpinan Rodrigo Duterte. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan kerelevansian dengan tema yang sedang dibahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum Filipina, pada bidang sosial dan politik, serta persoalan dan dinamika peredaran narkotika dan obat bius di negara ini.

BAB III membahas tentang faktor personalitas Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina yang memprioritaskan pencapaian stabilitas keamanan akibat dipengaruhi kehidupan dan pengalaman pribadi, serta dari masyarakat pendukung dan partai politik Filipina.

BAB IV membahas tentang faktor personalitas Rodrigo Duterte sebagai pembuat kebijakan (*decision making actors*) yang berupaya mendukung pencapaian kepentingan nasional Filipina untuk dapat mencapai kepentingan nasional pada bidang politik, sosial-ekonomi dan dinamika internasional.

BAB V merupakan bab berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.